



LURAH KALURAHAN KEMADANG  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PERATURAN KALURAHAN KEMADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMADANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KEMADANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4));
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
20. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kemadang Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2020 Nomor 6 );
21. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2020 Nomor 7 );
22. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG

Dan  
LURAH KEMADANG  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN KEMADANG TAHUN ANGGARAN  
2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemadang Tahun Anggaran 2024  
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.713.142.975,00
2. Belanja Desa	Rp	8.202.080.043,00
Surplus/Defisit	Rp	(3.488.937.068,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.488.937.068,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.488.937.068,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan  
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan  
anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,  
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang  
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang  
Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan  
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kemadang.

Ditetapkan di : KEMADANG

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : KEMADANG

Pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK

SUMINTO

LEMBARAN KALURAHAN KEMADANG NOMOR 7 TAHUN 2023



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TANJUNGSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶ  
ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦺꦩꦢꦁ

Alamat : JL. Baron Km16 Wonosari Gunungkidul.

Kode Pos : 55881

Email: sid.kemadang@gmail.com Website: kemadang-tanjungsari.desa.id

**PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG  
DAN  
LURAH KEMADANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEMADANG  
TENTANG**

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan desember Tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL Kemadang, menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Kemadang tentang :

**Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Dua ribu dua puluh tiga untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.**

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Kemadang dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kemadang dan Lurah Kemadang.

**LURAH KEMADANG**



**H. SUTONO, S.IP**

**KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KEMADANG**



**SUHARDI**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	139.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.468.742.975,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	105.400.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.713.142.975,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.231.569.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.042.103,00	
5.3.	Belanja Modal	5.086.868.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	208.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.202.080.043,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.488.937.068,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.488.937.068,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	169.937.068,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	3.319.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>3.488.937.068,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kemadang, 29 Desember 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	139.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.468.742.975,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	105.400.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.713.142.975,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>5.519.728.293,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.529.410.238,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.600.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.054.251.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.054.251.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.659.480,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	67.587.480,00	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	150.460.498,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.460.498,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.651.360,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	531.360,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.120.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	94.981.500,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.981.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.206.400,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.206.400,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>958.168.100,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.700.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.700.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.237.500,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.237.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	912.163.100,00	DDS, DLL, PAD, F
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	912.163.100,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.567.500,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.567.500,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.500.000,00	DLL, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	10.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>59.125.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.400.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	680.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	40.045.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.045.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>127.390.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.400.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.055.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.055.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.200.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.825.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.825.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.085.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.085.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.150.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	14.920.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.775.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.775.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.150.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	9.500.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	630.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.845.634.955,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.736.784,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.736.784,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	2.835.922.171,00	PAD
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.922.171,00	
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	2.730.000.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	4.776.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.776.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.200.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.412.861.750,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>38.050.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	25.450.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.450.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>180.880.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.920.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.810.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.810.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	22.020.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.020.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	42.480.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.480.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	46.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.770.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.680.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.680.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>583.767.500,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	274.330.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	274.330.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	254.857.500,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	254.857.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	46.080.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	46.080.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	8.500.000,00	PAD
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>292.075.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	130.525.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.525.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	150.525.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.525.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	11.025.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.025.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.520.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.520.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>315.569.250,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10.500.000,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	305.069.250,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.069.250,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>235.390.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15.300.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	8.100.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.900.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.300.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>202.250.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	5.950.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.400.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.500.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	6.400.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	157.000.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.200.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	1.500.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.100.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.600.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.640.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.900.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.240.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>825.500.000,00</u></b>	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.200.000,00</b>	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.900.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.300.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>117.500.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	117.500.000,00	PBP
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	117.500.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>699.800.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	687.500.000,00	PBP
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	687.500.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.500.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	PAD
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	1.800.000,00	
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>208.600.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>25.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>183.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	183.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	183.600.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>8.202.080.043,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(3.488.937.068,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.488.937.068,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>3.488.937.068,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

